

- K. Marx. 1969. *Karl Marx on Colonialism and Modernization*. New York: Anchor Book
- Kompas. 2009. Inilah Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, 21 Oktober. [20 Januari 2011.]
- Khofifah Indar Parawansa. 2006. *Enhancing Women's Political Participation in Indonesia*. [www.idea.int/publications/wip2/upload/Indonesia.pdf](http://www.idea.int/publications/wip2/upload/Indonesia.pdf), [9 Maret 2010.]
- Kusumaningtyas. 2006. "Perempuan dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu 2004: Representasi dan Pandangan Politik" dalam Irianto, S. (Editor) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- MacCormack Carol P. dan Stratem, M. 1980. "Nature, Culture and Gender: A Critique", dalam MacCormack C.P. dan Stratem, M. *Nature, Culture and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mansyur Fakhri. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M Mies.1980. "Capitalist Development and Subsistence Production: Rural Women in India". *Bulletin of Concerned Asian Scholars*
- Muhammad Fauzan. 2007 "Eksistensi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Sebuah Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih" disampaikan dalam *Seminar Nasional Tentang Peran Hukum Mewujudkan Clean Governance*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 5 Mei.
- Sukri, S.S. tt. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*
- Swamy, A. et al. 2001. "Gender and Corruption." *Journal of Development Economics*
- Tri Lisiani Prihatinah. 2009a. "Model Kepala Keluarga Berkesetaraan Jender " *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*. Purwokerto : Universitas Soediman
- \_\_\_\_\_.2009b. "Tipe Kepemimpinan Maskulin atau Feminim Yang Berpengaruh terhadap Keberhasilan Perempuan di Ranah Publik." Makalah dalam *Seminar Nasional Kepemimpinan Yang Berperspektif Jender* 18 Juni 2009. Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.

# EVALUASI PERJALANAN REFORMASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Moh Jamin

## Abstract

*The National Police of Republic of Indonesia, which is signed from military separation, has been managing more than a decade. It is time to evaluate the run of police reformation. In fact, according to structural, instrumental, and cultural of police reformation has not operated conforming to expectation. It is caused by symbolic and elementary reformation policies, whereas from cultural aspect (mind set and cultural set) has not acquired satisfactory section. The escalation of trust society which became strategic plan of National Police of Republic of Indonesia 2005-2010 still unrealized. The law enforcement of National Police of Republic of Indonesia is still disappointing, because its utilizes positivistic approach and less applies local wisdom approach. Therefore, it often injuries people's justice. The character of National Police of Republic of Indonesia behaviors are not free from corruption. The National Police of Republic of Indonesia reformation as parts of penal judgment system requires the amendment of Act Number 1 of 1981 regarding Penal Procedural Law and Act Number 2 of 2002 regarding Police in order to ad rem the enthusiasm of police reformation. The National Police of Republic of Indonesia reformation entails progressive policy to decamp from conservative outlook that has become a mainstream of police organization.*

**Keywords:** evaluation, reformation, The National Police of Republic of Indonesia (POLRI)

## A. Pendahuluan

Reformasi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) senafas dengan momentum dipisahkan-nya Polri secara kelembagaan dari TNI (ABRI). Reformasi Polri diawali dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI, pada April 1999. Ditinjau dari sisi norma hukum, Inpres ini sebenarnya mengandung *debatable*, karena bentuk Inpres tersebut menyalahi hirarki peraturan perundang-undangan. Inpres tidak dapat mencabut berlakunya suatu Undang-Undang yaitu UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Muhammad Fajrul Falaakh, et.all.: 2001: 263-274). Inpres tersebut menginstruksikan kepada Menteri Pertahanan untuk menyiapkan langkah pemisahan Polri dari angkatan bersenjata. Pada Juli 2000, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 89/2000 tentang kedudukan Polri. Keppres ini menyatakan bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah presiden.

Kebijakan tersebut kemudian didukung politik kenegaraan dengan dikeluarkannya kebijakan berupa TAP MPR No. VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan Polri dan TNI, dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran Polri dan TNI. Kebijakan ini mengakhiri status Polri di bawah garis komando ABRI selama Orde Baru.

Terkait peran Polri, BAB II Pasal 2 TAP MPR No. VII Tahun 2000 menyatakan bahwa.

1. Kepolisian negara merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan perlindungan masyarakat.
2. Dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan profesional.

Berdasarkan kedua TAP MPR tersebut kemudian disusun kebijakan operasional Polri yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang merumuskan perubahan paradigma kepolisian dengan harapan dapat memantapkan kedudukan, peranan serta pelaksanaan tugas Polri.

Pemisahan struktur organisasi dari militer, aparat kepolisian diharapkan tidak lagi tampil dalam *performance* dan watak yang militeristik, dan dapat bekerja profesional sebagai aparat kepolisian sipil. Pemisahan (kemandirian) Polri dari militer bukan merupakan tujuan tapi sebagai langkah dan sarana dimulainya reformasi Polri. Tujuan reformasi kepolisian adalah membangun kepolisian sipil yang profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat sesuai dengan menjunjung tinggi norma-norma demokrasi, menghormati HAM dan hukum internasional lainnya.

Selanjutnya dalam rangka reformasi kepolisian, Polri telah menyusun Renstra Polri 25 Tahun sebagai arah dan pedoman. Isi dari Renstra tersebut adalah (Bambang Widodo Umar, 2009 : 3) sebagai berikut.

# POLITIK HUKUM PERADILAN DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA

Yuherman

## Abstract

*Law has meaning in wide range of contexts, both written and unwritten. The written law is not merely the constitutions that were created by the house of representative as well as the Government (DPR), but also includes the written laws which were stated by the Court that is known as The Jurisprudence.*

*Law is directed to regulate the human being in order to be well arranged. But frequently laws or constitutions were left behind and irrelevant with the current community development, uncompleted, and its interpretation are unclear or still debatable, even an unsynchronization between one regulation and the others is not rarely met, both vertically and horizontally. Meanwhile, the court can not refuse the proposed case to be handled; indeed the court's role in the civil case accomplishment is irreplaceable.*

*The law's politic dimension of the arranger has its influence on the law development. The politic of law that the Court took place must be directed to achieve the aim of the law, by considering the values of Pancasila as the law resource or the prosecution principles in The Law State of Indonesia.*

## A. Pendahuluan

Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama (Moh. Mahfud MD, 2010: 5). Hukum mempunyai pengertian yang sangat luas, bukan hanya hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Hukum tertulis bukan hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk pula hukum tertulis yang dibentuk oleh pengadilan melalui putusan-putusannya, yang kemudian kita kenal sebagai *yurisprudensi*.

Politik hukum itu tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara Indonesia (Sunaryati Hartono, 1991: 1). Politik hukum dapat mewujudkan dalam pembentukan hukum, sehingga dia merupakan politik hukum dari pembuat hukum itu sendiri. Dengan demikian, politik hukum mempunyai misi merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu politik hukum direfleksikan pada semua produk hukum yang dibuat oleh pembuat hukum dalam arti luas, yang tidak terbatas hanya pada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang, tapi juga lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui putusannya.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan kekuasaan kehakiman tersebut

dibuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan badan-badan peradilan, norma hukum yang akan ditegakkan dan hukum acara yang akan mengatur pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang dibuat seringkali tertinggal dan tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat, tidak lengkap, dan mempunyai penafsiran yang tidak jelas atau masih *debatable*, bahkan tidak jarang terdapat pula ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan satu dan yang lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Penyelesaian sengketa keperdataan saat ini terlihat kecenderungan pergeseran penyelesaian sengketa dari peradilan kepada *alternatif dispute resolution* (ADR) dan pergeseran kewenangan secara absolut dan relatif antar lembaga peradilan. Istilah sengketa dalam hal ini, lebih mengacu pada peristilahan yang digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata dan sengketa dagang (Takdir Ramadi, 2010: 1).

Para pihak yang memilih penyelesaian sengketa dengan mengajukan upaya hukum kepada lembaga peradilan tetap harus diterima karena pengadilan tidak boleh menolak perkara (*curia novit*) dan terhadap perkara tersebut pengadilan harus memberikan putusannya. Dalam realita hukum yang demikian, peradilan dituntut untuk bersikap tetap menjaga prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman melalui putusannya dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum.

Dalam perkembangan kelembagaan peradilan, khususnya mengenai penyelesaian sengketa keperdataan, telah diletakkan dasar bagi pemben-

tukan badan peradilan dan atau kelembagaan baru bidang yudisial, seperti pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan atau badan lain dengan kewenangannya sendiri seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), disamping peradilan umum dan peradilan agama yang sudah ada lebih dahulu. Selain itu dibuat pula sejumlah hukum baru, akan tetapi ragam persoalan dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat selalu di depan sehingga kelembagaan hukum dan perundang-undangan terkadang tidak bisa mengakomodasi perkembangan tersebut. Fakta ini mendorong peradilan untuk mencari solusinya untuk dapat terus melaksanakan tugas penegakan hukum. Mengenai bagaimana peradilan menyikapi dan melaksanakannya, merupakan cerminan dari politik hukum yang dijalankan peradilan dalam mencapai tujuan-tujuan hukum pada penyelesaian sengketa yang dihadapkan padanya.

Kondisi tersebut di atas menjadi perhatian penulis dan membahasnya pada tulisan ini. Setidaknya terdapat dua masalah yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Bagaimana keterlibatan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana politik hukum peradilan dalam praktek penegakan hukum?

## **B. Negara Hukum dan Peradilan sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tentang Negara Hukum Indonesia, yaitu dengan menyatakan bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Hukum Indonesia ialah negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan Pancasila (Sjahan Basah, 1985:11). Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis (Zainudin, 2006:135).

Dalam kaitan pandangan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut Oemar Senoadji menjelaskan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum dari semua pembentukan hukum. Oleh sebab itu Negara Hukum Indonesia disebut pula sebagai Negara Hukum Pancasila (Oemar Senoadji, 1985:24-25). Berkenaan dengan paham Negara hukum Indonesia dan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum tersebut maka hukum yang dibentuk oleh pembuat hukum haruslah merefleksikan Pancasila. Demikian pula dalam pelaksanaan hukum-hukum yang dibentuk,

termasuk hakim dalam membuat putusannya. Pada saat ini, Negara Hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pasca amandemen keempat), yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Sri Sumantri menyebutkan empat unsur negara hukum, yaitu (Sri Soemantri, 1984: 17):

1. Pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasar atas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi (dari warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan).

Pembagian kekuasaan negara kepada peradilan ini sejalan dengan paham pembagian kekuasaan yang dianut oleh UUD 1945 yang disebutkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini juga menjadi salah satu dari kekuasaan negara dalam konsep *trias politica*, yang digambarkan oleh Montesque, akan tetapi berbeda dengan UUD 1945, Montesque menganut paham pemisahan kekuasaan (*separation of power*), sedangkan UUD 1945 menganut paham *distribution of power*.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang bebas dalam menjalankan fungsi kelembagaannya sebagai badan peradilan (*judicial*) dan kebebasan dalam segala hal yang berkenaan dengan pendukung fungsi kelembagaannya seperti tata usaha (administrasi) dan tata kerjanya, struktur kelembagaan dan personil, pembinaan sumber daya, dan pembangunan sarana pendukung yang terkait dengan pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga mereka menjadi lembaga yang bebas dan mandiri serta dapat menolak intervensi apapun dan dari siapapun.

Kebebasan lembaga peradilan ini oleh Oemar Seno Adji disebutkan sebagai aspek yang fundamental dan *conditio sine qua non* dalam negara hukum bagi Indonesia (Oemar Senoadji, 1985: 251). Sementara itu fungsi pokok dari kekuasaan kehakiman yang mandiri adalah untuk memberikan layanan umum (*public services*) yang sebaik-baiknya bagi masyarakat di bidang peradilan (Paulus Efendi Lotulung, 1999). Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri yang terbebas dari segala intervensi dan pembatasan dalam bentuk apapun, kecuali intervensi dan pembatasan oleh tujuan-tujuan hukum yang hendak ditegakkannya.

## 1. Kewenangan Peradilan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.

UUD 1945 sebagai kaidah hukum kenegaraan tertinggi mempunyai ruang lingkup yang terbatas, yaitu hanya memuat kaidah-kaidah pokok sebagai dasar pembentukan hukum (Bagir Manan, 1986: 45). Oleh sebab itu pembentukan peradilan yang diamanatkan oleh UUD 1945 didasarkan pada suatu undang-undang yang khusus dibuat untuk itu.

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen keempat adalah:

- a. Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu, dapat pula dibentuk peradilan khusus dalam lingkungan peradilan tersebut.  
Masing-masing lingkungan peradilan tersebut terdiri atas pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding, dan semuanya berpuncak pada mahkamah agung sebagai *supreme court*, melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dan menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selain sebagai pengadilan tingkat kasasi dari semua putusan peradilan yang berada di bawahnya, juga berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tentang permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hak uji material atau hak untuk menilai peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah Undang-Undang mengenai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.  
Mahkamah konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman untuk mengadili sengketa tentang kewenangan antara lembaga negara, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan sengketa hasil pemilihan umum. Putusan

mahkamah konstitusi adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan terhadap putusannya. Mahkamah konstitusi tidak ada kaitannya dengan mahkamah agung dan peradilan yang ada di bawahnya.

- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai ketentuan dan perintah konstitusi tersebut maka dalam pelaksanaannya, yaitu melalui pembentukan Undang-Undang oleh presiden bersama DPR telah diberikan kewenangan-kewenangan absolut dari badan peradilan tersebut berdasarkan suatu Undang-Undang khusus, yaitu:

- a. Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- d. Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- g. Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- h. Pengadilan Niaga berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- i. Pengadilan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- j. Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
- k. Mahkamah Syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- l. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- m. Pengadilan Perikanan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.
- n. Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- o. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tipikor.

Selanjutnya, kewenangan masing-masing peradilan secara relatif ditetapkan berdasarkan hukum acara yang terkait dengan badan peradilan tersebut ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang pendiriannya. Selain pembentukan badan peradilan tersebut, dalam perkembangannya kemudian juga telah dilakukan perubahan atau perluasan kompetensi atau kewenangan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian sengketa bersifat keperdataan yaitu:

- a. Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberikan kewenangan lain, yaitu untuk memeriksa sengketa bisnis syariah, di samping kewenangannya memeriksa sengketa perkawinan, perceraian, dan warisan bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang berwenang untuk memeriksa sengketa bisnis dibidang Rahasia Dagang. Akan tetapi Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya karena hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.
- c. Pengadilan Negeri kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang para pihaknya telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, namun Pengadilan Negeri tetap berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa perlawanan terhadap putusan arbitrase atau melakukan eksekusi atas putusan arbitrase jika para pihak tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela. Selanjutnya terhadap putusan arbitrase diluar Indonesia menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- d. Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR (Hukum Acara Perdata) dan asas *pancta sunt servanda* secara relatif juga tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang para pihaknya telah menyepakati bahwa penyelesaian sengketa diantara mereka akan dilakukan melalui yurisdiksi peradilan lain yang dipilih diluar kedudukan hukumnya.
- e. Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berwenang mengadili untuk tingkat pertama dan terakhir tentang sengketa penyelenggaraan izin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perseroan terbatas
- f. Pengadilan Niaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain yang terkait dengan kepailitan atau PKPU yang sedang berlangsung tanpa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kewenangan ini sekaligus meniadakan kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut untuk memeriksa sengketa dimaksud.

- g. Pengadilan Niaga berdasarkan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, berwenang memeriksa sengketa perdata dibidang Hak Kekayaan Intelektual kecuali dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual dibidang Rahasia Dagang yang masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan ini sebelumnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
- h. Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa sengketa antara buruh dengan pengusaha yang timbul dalam hubungan kerja mereka baik mengenai upah maupun pemutusan hubungan kerja tanpa Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Sebelumnya kewenangan ini ada pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D), Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sebagai pengadilan tingkat banding tanpa pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewenangan peradilan tersebut di atas merupakan kewenangan absolut mengadili perkara tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selanjutnya, peradilan-peradilan tersebut juga mempunyai kewenangan memeriksa sengketa secara relatif di antara peradilan sejenis menurut wilayah hukum masing-masing, setiap daerah kabupaten dan kota menjadi yurisdiksi dari setiap pengadilan negeri dan pengadilan agama sedangkan peradilan tatausaha negara dan peradilan militer pada tingkat propinsi. Selanjutnya, pengadilan banding sesuai dengan kewen-

angan absolutnya terbagi atas pengadilan tinggi yang membawahi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi agama pada setiap propinsi, pengadilan tinggi tatausaha negara dan pengadilan tinggi militer membawahi beberapa propinsi tertentu.

Pengadilan niaga sebagai peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, selain mempunyai kewenangan absolut memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang mempunyai kewenangan secara relatif diantara sesama pengadilan niaga. Pengadilan niaga untuk pertama kalinya dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999, terdapat sejumlah pengadilan niaga dengan kompetensi relatifnya sendiri, yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan,

Pengadilan hubungan industrial yang juga merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum terdapat pada daerah yang padat industri yang berpotensi banyak terjadi sengketa hubungan industrial.

Arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat mengenyampingkan peran peradilan apabila perdamaian yang diperoleh tidak dilaksanakan secara sukarela. Dengan demikian tidak berarti cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah ditinggalkan, sehingga tidak populer lagi. Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan (Eman Suparman, 2010) dan kewenangan pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa tetap ada, apalagi eksekusi paksa putusan arbitrase atau perlawanan terhadap putusan arbitrase harus diajukan melalui pengadilan negeri. Badan arbitrase yang memutus sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi karena arbitrase bukan badan kekuasaan resmi tetapi hanya merupakan badan swasta (Yahya Harahap, 2001:298).

Penyelesaian sengketa dengan mediasi dilakukan dalam kerangka pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan.

Sedangkan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi atau negosiasi yang dilakukan diluar pengadilan hanya berlaku sebagai suatu kesepakatan penyelesaian sengketa biasa, bukan putusan penyelesaian sengketa, sehingga apabila kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut tidak dilaksanakan dikemudian hari oleh para pihak, akan menimbulkan sengketa baru. Berbeda halnya dengan putusan penyelesaian sengketa yang didahului dan diperoleh melalui proses perkara di pengadilan, maka terhadap pelanggaran pelaksanaan putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi paksa pada pengadilan.

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang harus diselesaikan melalui Komisi Banding pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sengketa mengenai persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli yang diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa penyelesaian tertentu dibidang perbankan oleh mediasi perbankan ataupun sengketa konsumen yang diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dapat menghasilkan keputusan yang berdaya paksa bagi para pihaknya. Oleh sebab itu, pengadilan tetap eksis dan berwenang apabila penyelesaian melalui lembaga-lembaga tersebut tidak efektif.

Memperhatikan permasalahan dan kelembagaan yudikatif dan non yudikatif tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa keterlibatan negara melalui kekuasaan kehakimannya atau fungsi peradilan masih dan bahkan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa keperdataan meskipun sengketa tersebut merupakan wilayah privat. Persoalannya adalah sikap para pihak yang terkait dengan sengketa yang akan menentukan, apakah sengketa di antara mereka akan dibawa ke pengadilan atau tidak. Apabila pengadilan yang menjadi pilihan penyelesaian sengketa, maka para pihak harus tunduk pada hukum positif yang berlaku tentang kewenangan pengadilan, termasuk forum dan pilihan kompetensi pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Bahkan pelaksanaan eksekusi paksa atas putusan arbitase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak hanya dapat dilaksanakan dan menjadi kewenangan pengadilan.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

atau kurang jelas (Yudha Bakti Ardiwisastra, 2008:13). Para hakim dituntut bertindak aktif dan proaktif dalam menafsirkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam keputusan-keputusan terdahulu, baik oleh hakim yang bersangkutan ataupun hakim-hakim lain di tempat yang berbeda. Peranan hakim demikian itu dengan sendirinya membangun tradisi tersendiri dengan memberlakukan putusan hakim sebagai hukum yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Tradisi inilah yang kemudian dikenal dengan "*judge-made law*" (hukum buatan hakim) atau sekedar pemberlakuan "yurisprudensi" sebagai sumber hukum menurut tradisi "*civil law*" (Jimly Asshiddiqie, 2000: 59). Dalam hal yang demikian maka pengadilan telah menjalankan perannya sebagai subyek pembuat hukum, dimana politik hukum yang diperankan dan diaktualkannya akan tercermin dalam putusannya.

## 2. Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa

Politik hukum peradilan ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Penerapan peraturan perundang-undangan dalam mengadili suatu sengketa tidaklah harus selalu "positivistik" atau seperti yang dituliskan oleh Undang-Undang tapi harus dengan pertimbangan apakah putusan yang diambil akan menjamin tercapainya keadilan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa, mengingat di samping hukum tertulis masih ada hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karenanya putusan itu juga harus mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntut dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Jadi bukan hanya mengejar kepastian hukum semata. Tugas mulia peradilan tersebut hanya dapat dilakukan dalam sistem peradilan yang mandiri dan merdeka dengan integritas teruji para pelaksananya.

Dalam sistem peradilan yang merdeka, putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan sistem hukum yang mendasarkan diri pada prinsip konstitusionalisme (Jimly Asshiddiqie, 2000: 36). Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formil (*formele waarheid*) maupun kebenaran materil (*materiele waarheid*) yang keduanya termasuk dalam



lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*) (Bambang Sutiyoso, 2010: 124). Oleh sebab itu timbul pertanyaan bagaimana politik hukum pengadilan terhadap kedua hal tersebut, termasuk pula jika terjadi ketidakjelasan atau kekosongan hukum.

Apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan yang diterapkan sekalipun ditafsirkan menurut bahasa sejarah, sistematis dan sosiologis sedang dilain pihak hukum kebiasaan atau hukum adatpun tidak ada peraturan yang dapat membawa hakim kepada penyelesaian perkara itu, berarti persoalan ini bersangkutan dengan kekosongan hukum dalam sistim formil dari hukum (Yudha Bakti Adiwisastro, 2008:12).

Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formal, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat di kalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan (Yudha Bakti Adiwisastro, 2008:127).

Banyaknya Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi termasuk di antaranya yang menyangkut kewenangan peradilan, di satu sisi menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sudah semakin tinggi dan di sisi yang lain membuktikan bahwa politik hukum dalam pembuatan Undang-Undang tidak selamanya memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan, sebaliknya ketentuan tersebut hanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Gambaran di atas menunjukkan bahwa hukum yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang dan yang akan diterapkan oleh pengadilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan belum sepenuhnya merupakan refleksi dari kehendak masyarakat bahkan dengan pembatalan ketentuan undang-undang tertentu oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa norma yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang bertentangan dengan hukum dasar.

Menghadapi kondisi transisional ketika persoalan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi, maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak

sekedar menerapkan peraturan secara hitam putih (Bernard L. Tanya, dkk, 2010: 217). Dalam hal ini hakim memeriksa kembali sistim materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa ketentuan yang mengandung persamaan, hakim membuat satu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) dan menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga yang bersangkutan. Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi. Konstruksi penghalusan hukum dan konstruksi *argumentum a contrario* (Yudha Bakti Adiwisastro, 2008:13).

Apabila sistem formal dengan sistem material berbeda dalam asasnya, proses mempertautkan ini tidak dapat dilakukan lagi. Dalam hal ini hakim harus menyatakan Undang-Undang tidak mengikat. Dalam sistem formal tidak ada pertentangan karena sistem hukum merupakan perwujudan dari suatu kesatuan yang logis. Apabila hakim akan mengisi suatu ruang yang kosong dalam sistim hukum, pengisian tambahan itu tidak boleh bertentangan dengan asas pokok dari sistem tersebut (Yudha Bakti Adiwisastro, 2008: 52).

Michael Perry Guru Besar Hukum Tatanegara dari *Ohio State University* mengatakan, pengadilan tidak seharusnya berfungsi sebagai agen yang anti mayoritas. Karena itu jika seorang hakim mengetahui bahwa pendapatnya sendiri berbeda dari konvensi tentang kebudayaan moral yang umum, maka ia bertanggung jawab untuk menghormati pandangan moral publik itu (Jimly Asshiddiqie, 1998: 49).

Dalam praktek peradilan di Amerika Serikat, hakim dapat saja membuat putusan keluar dari Undang-Undang. Salah satu sikap *Supreme Court* yang sangat mengguncang dunia pada abad yang lalu adalah pengabaian terhadap doktrin *Trias Politica* yang waktu itu dianggap sebagai doktrin yang mutlak dan tidak memedulikan adanya doktrin besar tersebut, *supreme court* membuat putusan-putusan melampaui wewenangnya sebagai badan peradilan. Ia dianggap telah menjalankan fungsi eksekutif dan menjalankan "pemerintahan oleh pengadilan" (*government by the judiciary*). Keberanian *Supreme Court* untuk bertindak seperti itu benar-benar telah mengguncangkan dunia masa itu (Satjipto Rahardjo, 2003: 238).

Dalam praktek peradilan di Indonesia, MA dalam putusan kasasi kasus Kedung Ombo

mempertimbangkan bahwa, “penduduk yang merupakan ekonomi lemah tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri untuk memperoleh perlindungan hukum...”, dengan perkataan lain, setidaknya-tidaknya dalam majelis kasasi perkara Kedung Ombo, pengadilan Indonesia sudah memihak kepada ideologi Pancasila dan karena itu mendasarkan putusannya pada “legalisme Pancasila” dan bukan legalisme liberal (Satjipto Rahardjo, 2003: 238). Putusan ini dapat dilihat sebagai politik hukum peradilan dengan mengedepankan tujuan hukum yang menggunakan Pancasila sebagai kaidah penuntun.

Dalam perkembangan praktek peradilan selanjutnya, politik hukum yang dijalankan peradilan semakin menunjukkan keberaniannya dengan dibuatnya putusan-putusan dengan pertimbangan hukum yang keluar dari Undang-Undang dan mengisi ketidakjelasan atau kekosongan hukum terkait sengketa yang diperiksa. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah yurisprudensi yang berkenaan dengan pembatalan perjanjian untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

Para pihak yang membuat perjanjian menurut syarat-syarat Pasal 1320 KUH perdata akan terikat dengan perjanjian itu dan harus melaksanakannya dengan itikad baik, bahkan Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan kecuali menurut ketentuan yang ditetapkan dalam KUH Perdata sendiri, yaitu bahwa perjanjian itu lahir karena:

- a. *Dwaling* (kekhilafan, kekeliruan, atau kesesatan);
- b. *Dwang* (paksaan, kekerasan atau ancaman);
- c. *Bedrog* (penipuan).

*Misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUH Perdata Indonesia sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, akan tetapi makna dari alasan ini telah mengemuka dalam sejumlah yurisprudensi mahkamah agung, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2485K/Sip/1982 tanggal 13 Desember 1983 telah membatalkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali atas tanah karena harga penjualan sangat tidak seimbang dengan harga barang (rumah) yang sebenarnya (*woeker contract*).

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431/pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora. Dalam perkara ini perjanjian bunga 10% yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi dianggap terlalu tinggi. Dengan bunga sebesar itu Pemohon Kasasi yang sudah membayar hutangnya sebesar Rp.400.000 dari jumlah hutang pokok Rp.540.000,- oleh Termohon Kasasi dianggap sebagai pembayaran bunga. Mahkamah Agung berdasarkan *azas ex aequo et bono* membuat terobosan dengan menetapkan bahwa bunga yang sudah dibayar harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2003 telah membatalkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara notariel oleh para pihak dengan pertimbangan bahwa perjanjian tersebut dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan atau kesempatan sehingga Termohon Kasasi berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Selain itu berkenaan sengketa kewenangan mengadili, dapat dikemukakan produk hukum yang dipengaruhi politik hukum peradilan pada putusan Pengadilan Niaga yang tetap memutus sengketa kepailitan meskipun secara relatif pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung R.I. di tingkat kasasi tanggal 23 November 2006 No.27 K/N/2006. Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2006 Nomor 02/Perlawanan Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 04/ PKPU/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 11/ Pailit/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun duduk perkara pada pokoknya adalah:

Perlawanan tersebut berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh CV. Indo Jati (Terlawan I) terhadap PT. Indo Veneer Utama (Terlawan II). Terlawan II atau Termohon Pailit berkedudukan di Surakarta. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadilinya karena tempat kedudukan Termohon bukan wilayah hukumnya, tapi faktanya perkara tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT. Indo Veneer Utama (Termohon Pailit) tidak mengajukan eksepsi tapi meresponnya dengan mengajukan permohonan PKPU. Atas permohonan tersebut Pengadilan Niaga memberikan putusan PKPU Sementara dan PKPU Tetap.

Putusan ini yang dilawan oleh Pelawan PT. Hendrison Iriana dan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akan tetapi putusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung memper-  
timbang:

“Bahwa eksepsi kompetensi relatif adalah mengenai distribusi kekuasaan Pengadilan, yang apabila Terlawan II telah menerima bahwa perkaranya diperiksa dan diadili di Jakarta Pusat, Pelawan tidak dapat mengajukan keberatan apapun terhadap putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negei Jakarta Pusat tersebut, sehingga perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dari konstruksi perkara dan pertimbangan hukum putusan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kompetensi relatif pengadilan niaga yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai hukum acara khusus (*lex specialis*) untuk kepailitan, ternyata masih dapat dilenturkan oleh sikap diam dan tidak adanya keberatan dari Termohon terhadap kewenangan mengadili pengadilan yang memeriksa perkaranya meskipun nyata-nyata Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kewenangan secara kompetensi relatif menurut pasal 3 UUK dan PKPU serta Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999.

Putusan-putusan tersebut di atas menunjukkan politik hukum pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui penafsiran, reskonstrukturisasi hukum, dan mengedepankan keadilan serta kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan cara yang demikian maka peradilan sebagai salah satu pembentuk hukum, dapat menjalankan politik hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum sesuai dengan harapan masyarakat meskipun hukum yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya keluar dari undang-undang formil.

Dengan demikian pengadilan tidak menjadi corong hukum tapi corong dari tujuan hukum.

## C. Simpulan

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan

1. Kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat keperdataan dapat dikesampingkan oleh pilihan forum dan atau pilihan kompetensi peradilan secara relatif oleh para pihak. Akan tetapi pengadilan tidak dapat ditinggalkan dan menjadi hilang kewenangannya, serta menjadi satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan putusan secara paksa atas putusan forum diluar peradilan yang dipilih oleh para pihak bersengketa.
2. Politik hukum peradilan ditujukan untuk mencapai tujuan hukum, baik dalam melaksanakan hukum tertulis maupun tidak tertulis, termasuk dalam memberikan kejelasan, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa. Putusan peradilan adalah salah satu produk hukum dan dibuat oleh lembaga yudikatif. Politik hukum peradilan melalui putusannya haruslah memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum atau kaidah penuntut hukum

## D. Saran

Berdasarkan simpulan di muka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa dan pembentuk Undang-Undang:

1. Putusan penyelesaian sengketa melalui forum diluar pengadilan dan atau pilihan kompetensi peradilan secara relatif oleh para pihak sebaiknya dapat pula dilaksanakan oleh pengadilan yang dipilih oleh para pihak sepanjang pengadilan tersebut secara absolut mempunyai kewenangan terhadap sengketa tersebut.
2. Politik hukum peradilan yang telah memberikan kejelasan, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan penyelesaian sengketa terkait, sebaiknya menjadi bagian dari perubahan materi undang-undang terkait atau dibukukan secara khusus sehingga dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang relevan.

## Daftar Pustaka

- Bagir Manam. 1986. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. CV. Armico, Bandung.
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bernard L. Tanya dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eman Suparman. 2010. *Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menelesaikan Sengketa Komersial (Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitase Nasional dan Internasional)*, <http://resources.unpad.ac.id/unpad-collection/pergeseran-kompetensi-pengadilan-negeri-dalam-menelesaikan-sengketa-komersial/>, diakses tanggal 11 Juni 2010.
- Jimly Asshidiqie. 1998. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet.I Jakarta: Ind.Hill-Co.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Kapita Selekta Teori Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Moh.Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo.
- Oemar Senoadji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Paulus Effendi Lotulung. 1999. “ Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik”, Jakarta, 14 Oktober 1999, hal.159-161. Disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Maysarakat Madani, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. : 2485 K/ Sip/1982 tanggal 13 Desember 1983
- Putusan Mahkamah Agung RI No. : 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987
- Putusan Mahkamah Agung RI No. : 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2003
- Putusan Mahkamah Agung RI No.: 027 K/N/2006 tanggal 23 November 2006
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.
- Sjachran Basah. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet-1, Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri. 1984. *Pengantar Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Takdir Rahmadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Yahaya Harahap. 2001. *Arbitrase ditinjau dari Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan prosedur Ban, Internasional Center For The Settlement of Investment Disputes (ICS10) UNITRAL Arbitration, Convention on the Revognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, PERMA No. 1 tahun 1990*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudha Bakti Ardiwisastro. 2008. *Penafsiran dan Rekonstruksi Hukum*, Cet.2, Bandung: Alumni.
- Zainuddin. 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Z. Asikin Kusumah Atmadja. 1990. *Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara*. Jakarta: Mahkamah Agung RI